



Tameh: Journal of Civil Engineering
University of Muhammadiyah Aceh

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat

¹Melati Dewi, ²Zakia

^{1,2}Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Teuku Umar

¹melatidewi1905@gmail.com, ²zakia@utu.ac.id

Abstract

The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of West Aceh Regency plays an active role as a coordinating planner, and controller of implementation as well as researcher and development of regional development. In planning, BAPPEDA coordinates so that regional heads can carry out all tasks and activities in order to achieve harmony, integration and harmony between all agencies, including agencies and regional offices, in order to achieve maximum use and effective results. In planning an infrastructure development is the main task of infrastructure and regional development. This study aims to determine the role of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in West Aceh district infrastructure development. This study uses a qualitative method, presenting in the process of analyzing information obtained from respondents and informants. Questionnaires, field notes and other official documents are sources of data collected directly at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in West Aceh District, while the informants in this study are functional officials and staff in the Infrastructure and Regional Development section (IPW) in Bappeda Aceh Barat District, and the data collection method was a questionnaire in which 32 respondents were asked a series of questions or written statements to answer. The results of this study can be concluded that the role of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in infrastructure development in West Aceh District is a task in the field of Infrastructure and Regional Development, as coordination and synchronization of regional development planning in the field of Infrastructure and Regional Development. And the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) as a planning agency in the region as a support for government affairs in the field of planning and supporting government affairs in the field of research and development functions more as coordinator of management of infrastructure development both from government agencies and with the private sector/community.

Keywords: role, Bappeda, planning, development

Abstrak

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat berperan aktif sebagai perencana, koordinator, dan pengontrol pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah. Secara perencanaan, BAPPEDA berkoordinasi agar kepala daerah dapat melaksanakan semua tugas dan kegiatan guna tercapainya keserasian, keterpaduan, dan keserasian antar semua instansi, termasuk instansi dengan kantor wilayah, guna mencapai kegunaan yang maksimal dan hasil yang efektif. Dalam merencanakan suatu pembangunan infrastruktur merupakan tugas utama dari bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada pembangunan infrastruktur kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penyajian dalam proses menganalisis informasi yang diperoleh dari responden dan informan. Berupa kuesioner, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya merupakan sumber data yang terkumpul langsung di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Aceh Barat, Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pejabat fungsional dan staf di bagian Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) di Bappeda Kabupaten Aceh Barat, dan metode pengumpulan data dengan kuesioner dimana 32 responder ditanya serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat merupakan tugas di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, sebagai koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencanaan di daerah sebagai penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan fungsinya lebih banyak sebagai koordinator pengelolaan pembangunan infrastruktur baik dari instansi pemerintah maupun dengan swasta ataupun masyarakat.

Kata kunci: peranan, Bappeda, perencanaan, pembangunan

<https://doi.org/10.37598/tameh.v11i2.235>

1. Pendahuluan

Setiap penyelenggara pemerintahan daerah dan pusat harus melakukan upaya yang sistematis dan terencana untuk memenuhi perannya dan memastikan bahwa Bappeda berfungsi secara optimal sebagai badan yang berperan penting dalam pelaksanaan, perencanaan, dan pembangunan. BAPPEDA adalah organisasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab bertindak langsung untuk daerah. Selain itu, keberadaan mereka sebagai bagian yang membantu pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan daerah, memperkuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kota, dan seluruh instansi pemerintah sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat secara aktif berperan sebagai perencana, koordinator, dan pengendali pelaksanaan, serta pengkajian dan pengembang pembangunani, daerah rangka melaksanakan tugas, dan fungsinya tersebut. Bappeda Kabupaten Aceh Barat melaksanakan tugas sebagai berikut [1]:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan dibagian perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Menyelenggarakan pengembangan kebijakani dan perencanaan, dibagian penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan;
3. Pengaturan bantuan khusus dalam ruang pengaturan kemajuan, karya inovatif;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta memberikan laporan pembangunan daerah;
5. Bimbingan teknis pengelolaan fungsi penunjangi urusanl pemerintahani di bagian perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. Membantu koordinasi dan ipelaksanaan kegiatan yang disponsori pemerintah di bagian perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
7. Menerapkan fungsi kedinasani lainnya yang diberikani oleh Bupati sesuai dengann lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Secara perencanaan, BAPPEDA berkoordinasi agar kepala daerah dapat melaksanakan semua tugas dan kegiatan guna tercapainya keserasian, keterpaduan, dan keserasian antar semua instansi, termasuk instansi dengan kantor wilayah, guna mencapai kegunaan yang maksimal dan hasil yang efektif. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya rangkaian pembangunan berkelanjutan yang mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, harus mengikuti Perencanaan Nasional berdasarkan UU 25 Tahun 2004 [2]. Pelaksanaan pembangunan nasional secara berkesinambungan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan kualitas"hidup penduduk diIndonesia. Dalam proses pelaksanaanya. Untuk mewujudkan sistem perencanaan yang inklusif, selaras, sistematis, peka terhadap perubahan zaman, dan pelaksanaand pembangunani secara serasi, iterpadu, dani sinergis, Badan Perencanan Pembangunan Daerah harus mampu menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan perencanaan pada pembangunan, daerah dengan seluruh instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Fasilitas yang menjadi modal dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian suatu bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dikenal dengan istilah pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur berperan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan nasional, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sosial dan bisnis masyarakat. Proses pembangunan seluruh sistem ketatanegaraan dalam rencanan mewujudkan misi bernegara dikenal dengan istilah "pembangunan nasional". Suatu usaha untuk menunjang atau memajukan segala bagian kehidupan masyarakat ataupun hidup berbangsa, dan bernegara dikenal dengan pembangunan nasional. Usaha untuk mewujudkan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD harus disusun sesuei dengan Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, iPengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah [3].

Untuk mewujudkannya atau memulai perencanaan pembangunan daerah dibagi

kedalam 3 periodisasi yang digunakan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu perencanaan yang periode dilaksanakan selama 20 tahun, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yaitu perencanaan yang periode pelaksanaannya di perkirakan siap dalam 5 tahun, Sedangkan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang periode proses perencanaannya 1 tahun. Perencanaan partisipatif antara lain harus dilaksanakan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional melalui musrenbang atau Musrembang. Rencana didiskusikan dan dikembangkan dengan semua pemangku kepentingan dalam musrenbang. Dalam sebuah memo, semua pemangku kepentingan mendiskusikan dan mengembangkan semua rancangan rencana. Pejabat publik, ulama, pemilik usaha, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan dari berbagai penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) termasuk di antara para pemangku kepentingan.

Peneliti tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang peran Kajian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat. Keterlibatan bappeda Aceh Barat dalam pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama studi ini.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pembangunan

Salah satu tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas adalah pembangunan secara umum. menyiratkan bahwa pembangunan adalah pelaksanaan tugas; akibatnya pasti akan melibatkan pembangunan daerah dari berbagai pihak dan komponen baik sebagai subjek maupun objek sehingga menimbulkan keragaman kepentingan. Perbedaan ini memerlukan integrasi proses dalam pembangunan. Upaya untuk mencocokkan dan mencocokkan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan oleh berbagai aktor swasta, masyarakat, dan pemerintah adalah koordinasi sebagai otoritas dalam pembangunan. Akibatnya, ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan ketika

menentukan perlunya koordinasi internal yang lebih baik. Pembangunan memerlukan koordinasi dengan cara sebagai berikut [4]:

1. Secara logis sebagai akibat adanya berbagai kepentingan dan pengejaran.
2. Aktivitas dan minat berbeda, yang memiliki konsekuensi logis untuk tanggung jawab yang berbeda secara fungsional.
3. Adanya badan, organisasi, dan lembaga yang menjalankan tanggung jawabnya masing-masing.
4. Proses pembangunan memadukan desentralisasi dan sentralisasi, serta pelibatan instansi daerah dan pusat.
5. Koordinasi adalah cara untuk mencapai keselarasan dalam suatu proses pembangunan untuk membangun pengaturan yang sinergis, harmonis, dan kompatibel untuk mencapai tujuan bersama.

Proyeksi gagasan dan harapan manusia yang paling jauh jangkauannya komponen masyarakat ideal yang paling baik atau paling baik adalah pembangunan menjadi tujuan umum (*goals*). Tujuan jangka pendek yang dikenal sebagai pengembangan tujuan khusus (tujuan) biasanya berfungsi sebagai ukuran kemajuan program menuju pencapaian tujuannya [5].

Penulis menyimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa pembangunan adalah usaha dan cara yang digunakan untuk melakukan perubahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Perencanaan Pembangunan

Suatu kegiatan dalam proses mempersiapkan kegiatan pembangunan ini yang secara otomatis dilaksanakan perencanaan pembangunan adalah proses bekerja menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan tahap seleksi ditetapkan secara sengaja, dengan mempertimbangkan kendala, persyaratan, dan skala yang ada. Saat membuat rencana pengembangan, ada lima pertimbangan utama yang harus diberikan:

1. Sebuah. Masalah potensial;
2. Keinginan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai;

3. Suatu kebijakan dan kemampuan untuk mencapai tujuann dan sasaran; dan
4. Pentingnya rencana sebagai program nyata.
5. Kerangka waktu untuk mencapai tujuan

Perencanaan pembangunan adalah cara untuk mengarahkan bagaimana sumber daya digunakan. Pembangunan terbatas ada untuk mencapai tujuan sosial ekonomii secara lebih efektif [6]. Perencanaan dan pembangunan adalah ide-ide untuk mengubah ekonomi suatu negara dari kondisi awal pembangunan menjadi ekonomi yang jauh lebih sejahtera. Perencanaan dan penetapan tujuan adalah hal-hal yang harus dilakukan, bagaimana, oleh siapa dan kapan.

2.3 Kerangka Dasar Teori

Tujuan dan fungsi BAPPEDA dalam rangka perencanaan daerah dijabarkan secara rinci dalam UU No. 25 Tahun 2004. Kepala Bappeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas dan tanggung jawab perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 23 [2]. Disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam Tipe A yaitu unsur penunjang dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupatani Aceh Baratl Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 [1].

2.4 Lokasi penelitian

Kantor BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat di Jalan Gaja Mada menjadi tempat penelitian akan dilakukan. Peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui peran BAPPEDA pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat.

3. Metode Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner, catatan lapangan, dan dokumensah lainnya merupakan sumber data yang terkumpul. Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menyajikan gambaran yang lengkap, menyeluruh, dan akurat. mengenai realitas empiris fenomena itu.

Peneliti akan mendeskripsikan peran BAPPEDA dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari jenis penelitian deskriptif. Studi deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara akurat, metodis, dan faktual peristiwa dan gejala. Penggunaan metode deskriptif kualitatif didasarkan pada fakta bahwa informasi dapat diperoleh secara lebih mendalam dan detail dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga memungkinkan penulis untuk fokus pada isu-isu spesifik di lapangan. Selain itu, pengkajian dengan kualitatif memungkinkan penuliis untuk menjelaskan lebih bayak penerangan karena wawancara dan observasi langsung digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan. Berbeda dengan eksperimen, di mana penelitian merupakan instrumen utama, untuk menyelidiki keadaan benda-benda alam digunakan metode penelitian berbasis *post positivisme* [7]. Strategi pemilahan informasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari wawancara, dokumentasi langsung di kantor Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Aceh Barat.

Penelitian ini melalui beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, antara lain analisis idata, data primer, dan data skunder.

a. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan dari sumber yang mapan disebut datai primer. Subyek yang memiliki informasi tentang Peran Bappeda dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Aceh Barat yaitu pejabat fungsional dan terdiri dari beberapa staf dipilih sebagai informan khususnya dalam bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah, adalah responden yang dilakukan tanya jawab langsung sesuai

dengan pedoman data yang diperlukan untuk penelitian.

b. Data Sekunder

Informasi opsional adalah informasi pendukung yang digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung informasi penting. Dokumen terkait pertanyaan penelitian yang diajukan oleh sumber perpustakaan dan data lembaga merupakan contoh data sekunder.

Penelitian ini berfokus untuk membatasi studi supaya tidak terlalu diperpanjang atau lari dari yang akan dibahas, yang akan diteliti yaitu: Peranan BAPPEDA kabupaten Aceh Barat pada Pembangunan Infrastruktur.

3.1. Pengumpulan Data

Menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

c. Observasi

Observasi adalah proses di mana seseorang menggunakan panca indera, pendengaran, penglihatan, dan penciuman dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kondisi, benda, aktivitas, dan peristiwa, situasi tertentu, dan perasaan seseorang merupakan hasil pengamatan. Mengamati suatu peristiwa atau kejadian untuk memperoleh gambaran untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian.

d. Kuesioner

Metode pengumpulan data; dimana responder ditanya serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab.

3.2. Analisis Data

Hasil yang telah didapatkan dan disusun dengan cermat digunakan dalam metode analisis kualitatif dan tabulasi penyajian dalam proses menganalisis informasi yang diperoleh dari responden dan informan. Saat mencoba mencapai kesimpulan yang unik secara logis (deduktif) atau induktif (induktif) secara logis menggunakan pemikiran ilmiah dan sistematis, berhati-hatilah.

Data dianalisis dengan menggambarkan keadaan yang didasarkan pada data objektif sehingga dapat ditarik hasil analisisnya:

1. Perlu dicari tema dan pola untuk membuat gambaran yang jelas, dan reduksi data juga membantu dalam pengumpulan data tambahan dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data mereduksi data yang bermakna dengan meringkas, memilih hal-hal yang signifikan dan memberi arti pada hal-hal yang sudah ada.
2. Diagram, flowchart, deskripsi singkat, hubungan antar kategori, dan format serupa lainnya dapat digunakan untuk menyiapkan data untuk ditampilkan. penyajian untuk mengkonsolidasikan data yang telah direduksi, menyederhanakan pembelajaran, dan menyimpulkan serta menginterpretasikan data.
3. Menarik/memverifikasi kesimpulan berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih rancu untuk memperjelas. Pada tahap ini dalam proses pengumpulan data, telah ditentukan bahwa temuan awal masih dalam tahap awal, dan akan direvisi bila ada banyak bukti yang ditemukan. Kesimpulan yang benar dan konsisten adalah kredibel ketika didukung oleh bukti.

Langkah-langkah pemrosesan data tercantum di bawah ini:

1. Mengedit data, khususnya mengecek kuesioner yang telah terkumpul.
2. Tabulasi data dilakukan dengan cara:
 - a. Nilai setiap item.

Tabel 1 skor berdasarkan tanggapan kuesioner

No	Indikator Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-Ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

- f. Menyusun daftar frekuensi tanggapan masing-masing responden menentukan proporsi jumlah total jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden, dengan menggunakan rumus mencari persentase hasil kuesioner, menurut sebagai berikut [7] :

$$p = \frac{f}{n} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan :

Dimana :

p = Presentasi

f = Jumlah Jawaban

n = Jumlah Responden

- g. Menentukan range/rentang dengan membagi data terbesar dan terkecil satu sama lain. Data dibagi dengan cara ini, data terbesar dengan terbesar, dimana 1 adalah 0% dari 5 dan 0% adalah data terkecil, dan 100% adalah terbesar, sehingga rentangnya adalah $100\% - 0\% = 100\%$. Panjang interval kelas harus ditentukan dengan membagi rentang dengan jumlah kelas, yang menghasilkan panjang 100 persen: $5 = 20\%$. Interval skor seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 dibangun menggunakan data ini. Menentukan proporsi jumlah total jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden, dengan menggunakan rumus mencari persentasi hasil kuesioner,

Tabel 2. Indikator Jawaban dan Skor Kuesioner

Skor	Indikator Jawaban
0%– 20%	Sangat Tidak Setuju
21% – 40%	Tidak Setuju
41% – 60%	Kurang Setuju
61% – 80%	Setuju
81 %– 100%	Sangat Setuju

- h. Penulis menghitung tanggapan untuk setiap pertanyaan setelah mendapatkan data dari kedua kuesioner. Penulis kemudian akan memaparkan hasilnya untuk menarik kesimpulan dari setiap pertanyaan setelah mendapatkan nilai persentase dan kriteria dari setiap kuesioner.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara dengan pejabat fungsional dan staf di bagian Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) di Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Demikian dapat dibuat kesimpulan sesuai dengan penelitian sebagai berikut:

BAPPEDA kabupaten Aceh Barat mempunyai peran penting khususnya dalam pembangunan

suatu daerah yang berperan sebagai koordinator perencanaan dan sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Peranan Bappeda pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat merupakan tugas di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, sebagai koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Berikut adalah beberapa cara di mana Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyiapan arsip perencanaan pembangunan daerah terkait infrastruktur dan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. Koordinasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Mengkoordinasikan penerapan Musrenbang Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
4. Koordinasi pelaksanaan kesepakatan infrastruktur dan pembangunan daerah dengan DPRD untuk RPJPD, 1RPJMD, dan 5RKPD;
5. Koordinasi pelaksanaan kesepakatan infrastruktur dan pembangunan daerah APBD dengan DPRD;
6. Mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dibagian infrastruktur dan pembangunan daerah untuk mencapai sinergi dan keselarasan;
7. Dibagian infrastruktur dan pembangunan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan sinergi dan harmonisasi kegiatan kementerian dan lembaga diprovinsi dan kabupaten;
8. Dukungan perencanaan untuk pelaksanaan latihan fokus untuk kebutuhan publik di bidang Kerangka Kerja dan Pergantian Daerah;
9. Merencanakan pelaksanaan penyelesaian bersama antara partisipasi lokal di bidang Yayasan dan Turnamen Provinsi; koordinasi

perencanaan pengembangan teknis infrastruktur dan pengembangan wilayah perangkat daerah kabupaten;

10. Pelaksanaan dukungan dan bantuan teknis penyiapan dokumen perencanaan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan pembangunan daerah;

11. Pelaksanaan kegiatan dari kedinasan tambahan yang diberikan oleh Kepala Bappeda

Dari rekap hasil kuesioner kajian peranan Bappeda, kabupaten Aceh Barat pada pembangunan infrastruktur, dapat di simpulkan sebanyak 32 para responden memberikan jawaban melalui kuesioner yang telah di isi. Dari pernyataan 1, seperti yang digambarkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jawaban pernyataan no 1

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	4	12.5%
Setuju	24	75%
Kurang Setuju	4	12.5%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 3 di atas, 4 responden (12,5%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), 24 responden (75%) menyampaikan tanggapan setuju (S), dan 4 responden (12,5%) menyampaikan kurang setuju (KS), bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Aceh Barat sepenuhnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun. Selanjutnya pada pernyataan no 2,

Tabel 4. Jawaban pernyataan no 2

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	10	31.25%
Setuju	22	68.75%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 4 di atas, 10 responden (30,25%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS) dan 22 responden (68,75%) menyampaikan

tanggapan setuju (S), bahwa RPJMD kabupaten Aceh Barat, sudah mendukung program RPJM provinsi Aceh. Kemudian, Dari pernyataan 3, seperti yang digambarkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jawaban pernyataan no 3

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	8	25%
Setuju	24	75%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 5 di atas, 8 responden (25%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (S), dan 24 responden (75%) menyampaikan tanggapan; setuju (S), bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sudah mendukung program RPJM nasional. Pada pernyataan no 4, seperti yang digambarkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jawaban pernyataan no 4

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	14	43.75%
Setuju	18	56.25%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 6 di atas, 14 responden (43,75%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS) dan 18 responden (56,25%) menyampaikan tanggapan setuju (S), bahwa Dalam menyusun rancangan akhir pembangunan daerah, Bappeda kabupaten Aceh Barat menyampaikan rencana dimaksud kepada DPRD, sebelum di tetapkan sebagai peraturan daerah kabupaten Aceh Barat. Lalu pada pernyataan no 5, seperti yang digambarkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jawaban pernyataan no 5

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	14	43.75%
Setuju	12	37.5%
Kurang Setuju	6	18.75%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 7 di atas, 14 responden (43,75%) menyampaikan tanggapan

sangat setuju (SS), 12 responden (37,5%) menyampaikan tanggapan setuju dan 6 responden (18,75%) menyampaikan tanggapan kurang setuju (KS), bahwa Rencana pembangunan kabupaten Aceh Barat menampung semua usulan masyarakat, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah kabupaten Aceh Barat. Pada pernyataan no 6, seperti yang digambarkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Jawaban pernyataan no 6

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	6	18.75%
Setuju	22	68.75%
Kurang Setuju	4	12.5%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 8 di atas, 6 responden (18,75%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), 22 responden (68,75%) menyampaikan tanggapan setuju (S), dan 4 responden (12,5%) menyampaikan tanggapan kurang setuju, bahwa Musrenbang jangka menengah daerah kabupaten Aceh Barat, dilaksanakan selambat-lambatnya 2 bulan, setelah Kepala Daerah dilantik. Pernyataan berikutnya no 7, seperti yang digambarkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Jawaban pernyataan no 7

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	14	43.75
Setuju	16	50
Tidak Setuju	2	6.25
Jumlah	32	100

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 9 di atas, 14 responden (43,75%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), dan 16 responden (50%) menyampaikan tanggapan setuju (S), bahwa RKPd sebagai penjabaran RPJMD yang disusun berdasar Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sedangkan 2 responden (6,25%) menyampaikan tanggapan tidak setuju. Pada pernyataan no 8, seperti yang digambarkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Jawaban pernyataan no 8

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	10	31.25%
Setuju	20	62.5%
Tidak Setuju	2	6.25%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 10 di atas, 10 responden (31,25%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), 20 responden (62,5%) menyampaikan tanggapan setuju (S), bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPd ditetapkan dengan, peraturan Kepala Daerah, sedangkan 2 responden (6,25%) menyampaikan tanggapan tidak setuju (TS). Pada pernyataan no 9, dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Jawaban pernyataan no 9

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	16	50
Setuju	16	50
Jumlah	32	100

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 11 di atas, 16 responden (50%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), dan 16 responden (50%) menyampaikan tanggapan setuju (S), bahwa Bappeda kabupaten Aceh Barat selalu melakukan evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPd dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya pada pernyataan no 10, seperti yang digambarkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Jawaban pernyataan no 10

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	16	50
Setuju	12	37.5
Kurang Setuju	4	12.5
Jumlah	32	100

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 12 di atas, 16 responden (50%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), 12 responden (37,5%) menyampaikan setuju, dan 4 responden (12,5%) menyampaikan tanggapan kurang setuju (KS), bahwa Evaluasi RKPd dilakukan sebagai dasar perubahan RKPd tahun berjalan. Pada pernyataan no 11, seperti yang digambarkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Jawaban pernyataan no 11

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	18	56.25%
Setuju	14	43.75%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 13 di atas, 18 responden (56,25%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), dan 14 responden (43,75%) menyampaikan tanggapan setuju (S), bahwa Bidang IPW di Bappeda kabupaten Aceh Barat, telah berkoordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Berikutnya pada pernyataan no 12, seperti yang digambarkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Jawaban pernyataan no 12

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	18	56.25%
Setuju	14	43.75%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 14 di atas, 18 responden (56,25%) menyampaikan tanggapan sangat setuju, dan sebanyak 14 responden (43,75%) menyampaikan tanggapan setuju, bahwa Bidang IPW di Bappeda kabupaten Aceh Barat, telah melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bersama OPD terkait. Pada pernyataan no 13, seperti yang digambarkan pada Tabel 15.

Tabel 15. Jawaban pernyataan no 13

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	8	25%
Setuju	24	75%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 15 di atas, 8 responden (25%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), dan 24 responden (75%) menyampaikan tanggapan setuju (S), bahwa Bidang IPW di Bappeda kabupaten Aceh Barat, telah melakukan koordinasi dengan DPRK

kabupaten Aceh Barat, terkait rencana pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Lalu pada pernyataan no 14, seperti yang digambarkan pada Tabel 16.

Tabel 16. Jawaban pernyataan no 14

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	12	37.5%
Setuju	20	62.5%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 16 di atas, 12 responden (37,5%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), dan 20 responden (62,5%) menyampaikan tanggapan setuju (S), bahwa Bidang IPW di Bappeda kabupaten Aceh Barat, telah melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah yang berada dibawah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Pada pernyataan no 15, seperti yang digambarkan pada Tabel 17.

Tabel 17. Jawaban pernyataan no 15

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	11	34.38%
Setuju	21	65.63%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 17 di atas, 11 responden (34,38%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), dan 21 responden (65,63%) menyampaikan tanggapan setuju (S), bahwa Bidang IPW di Bappeda kabupaten Aceh Barat, telah melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung program Pemerintah Aceh. Berikutnya pada pernyataan no 16, seperti yang digambarkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Jawaban pernyataan no 16

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	14	43.75%
Setuju	18	56.25%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 18 di atas, 14 responden (43,75%) menyampaikan

tanggapan sangat setuju (SS), dan 18 responden (56,25%) menyampaikan tanggapan setuju (S), bahwa Bidang IPW diBappeda kabupaten Aceh Barat, telah melakukan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Nasional dengan Lembaga/Kementerian atau pemerintah pusat lainnya. Pada pernyataan no 17, seperti yang digambarkan pada Tabel 19.

Tabel 19. Jawaban pernyataan no 17

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	6	18.75
Setuju	24	75
Kurang Setuju	2	6.25
Jumlah	32	100

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 19 di atas, 6 responden (18,75%) menyampaikan tanggapan, sangat setuju (SS), 24 responden (75%) menyampaikan tanggapan, setuju (S), bahwa Bidang IPW di Bappeda kabupaten Aceh Barat, telah melakukan koordinasi/pelaksanaan.kesepakatan/bersama dan kerja sama/antar daerah untuk kegiatan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, sedangkan 2 responden (6,25%) menyampaikan tanggapan, kurang setuju (KS). Lalu pada pernyataan no 18, seperti yang digambarkan pada Tabel 20.

Tabel 20. Jawaban pernyataan no 18

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	13	40.63%
Setuju	19	59.38%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 20 di atas, 13 responden (40,3%) menyampaikan tanggapan, sangat setuju (SS), dan 19 responden (59,38%) menyatakan setuju (S), bahwa Bidang IPW di Bappeda kabupaten Aceh Barat, telah melakukan koordinasi untuk penyediaan infrastruktur dan perencanaan terkait pembangunan daerah dan bantuan teknis kepada lembaga daerah. Lalu pada pernyataan no 19, seperti yang digambarkan pada Tabel 21.

Tabel 21. Jawaban pernyataan no 19

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	14	43.75%
Setuju	16	50%
Tidak Setuju	2	6.25%
Jumlah	32	100%

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 21 di atas, 19 responden (43,75%) menyampaikan tanggapan, sangat setuju (SS), 16 responden (50%) menyampaikan tanggapan setuju (S), bahwa/Bidang IPW diBappeda kabupaten Aceh Barat, telah melakukan teknis dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berada dibawah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, sedangkan 2 responden (6,25%) menyampaikan tanggapan tidak setuju (TS). Pada pernyataan terakhir no 20, seperti yang digambarkan pada Tabel 22.

Tabel 22. Jawaban pernyataan no 20

Indikator Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Sangat setuju	16	50
Setuju	15	46.88
Kurang Setuju	1	3.13
Jumlah	32	100

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 22 di atas, 16 responden (50%) menyampaikan tanggapan sangat setuju (SS), 15 responden (46,88%) menyampaikan tanggapan setuju (S), dan 1 responden (3,13%) menyampaikan tanggapan, kurang setuju (KS), bahwa,Bidang IPW, di Bappeda kabupaten Aceh Barat, telah melakukan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) bersama perangkat daerah yang/berada/dibawah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW).

Dari hasil pernyataan sebelumnya di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada pembangunan infrastruktur diKabupaten Aceh Barat, telah berperan dalam rencana pembangunan, Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), sebagai koordinator, dan pengontrol pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan

pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Kejadian ini terlihat dari pernyataan responden yang pada umumnya menyatakan "Sangat Setuju (SS)" sebesar 37,81%, dan responden yang menyatakan "Setuju (S)" sebesar 57,97%, sedangkan responden yang menyatakan "Kurang Setuju (KS)" sebesar 3,28%, yang menyatakan Tidak "Setujui (TS)" sebesar 0,94%, dan yang menyatakan "Sangat Tidak Setuju (STS)" sebesar 0%.



Gambar 1. Grafik Persentase

Berdasarkan tanggapan responden atas pertanyaan tentang peran Badan Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat, beberapa uraian tabel sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan pembangunan, khususnya: kemampuan untuk merencanakan; memproses data; dan merencanakan sebelumnya.
2. Pelaksanaan pembangunan, khususnya: Koordinasi; mengatur Konferensi; Konsultasi perencanaan; Pengendalian pembangunan.

Hasil utama, seperti yang ditunjukkan oleh batasan yang diperhatikan serta percakapan logis dan argumen pendukung. Selain menampilkan data mentah dalam bentuk tabel atau gambar, juga memberikan penjelasan dalam kalimat yang ringkas dan mudah dipahami.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dapat ditarik dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan kemampuan

Bappeda mengingat evaluasi setiap pelaksanaan berdasarkan penilaian setiap indikator yaitu:

1. Perkembangan rencana pembangunan di bidang IPW di Kabupaten Aceh Barat dianggap baik dalam kategori;
2. Pelaksanaan pembangunan dibawah bidang IPW di Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kategori baik;
3. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dibawah bidang IPW di Kabupaten Aceh Barat dianggap kategori baik; dan

Karena mayoritas responden yang dominan menilai setuju, uraian sebelumnya mengarah pada kesimpulan bahwa, pelaksanaan peran Bappeda pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat, dikategorikan baik. Hal ini seperti terlihat pada gambar 1, sebelumnya yang merangkum tanggapan responden terhadap peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat. Mayoritas responden, 57,97 persen, menilai kinerja di bidang IPW dikategorikan sangat memuaskan, sementara hanya 37,81 persen yang menilai memuaskan. Pelaksanaan peran Bappeda tidak menutup kemungkinan akan menemui berbagai kendala atau kendala dalam menjalankan fungsi dan programnya. Hal ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat harus selalu mengevaluasi pelaksanaan fungsinya terkait dengan kekurangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, karena Bappeda merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan daerah. Namun masih ada responden yang menilai kurang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) lebih berperan sebagai koordinator/penghubung antara pihak swasta dengan masyarakat dan instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur sebagai badan perencanaan di daerah. Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan

pengembangan. Peranan Bappeda pada pembangunan infrastruktur merupakan tugas bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) di Kabupaten Aceh Barat, sebagai perencanaan dan koordinator urusan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPW) di Kabupaten Aceh Barat bertugas mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibawah bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah (IPW).

Daftar Pustaka

- [1] Dokumen PROFIL BAPPEDA ACEH BARAT.
- [2] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- [3] Indonesia. 2017. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana.
- [4] Riyadi, Bratakusumah D.S. 2005, Perencanaan pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [5] Zulkarimen, N. (2004). Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya. *Jakarta. Rajawali Pers*.
- [6] Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [7] Sugiono. 2019:18. Penerbit repository. Stiedewantara
- [8] Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung Alfabeta.
- [9] Fahrizanur, Drs. H Burhanudin, M.Si, & Kalalinggi, M.Si, D. (2017). PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KABUPATEN PASER. *eJournal Ilmu Pemerintah*, 2017, 5(4): 1599-1612.
- [10] Nor, Z., Arifin, J., & Suryani, L. (2018). PERANAN BAPPEDA DALAM MUSREMBANG DI KABUPATEN TABALONG. *JAPB : Vol. 1, No. 2, Novembaer 2018*, 828-842.
- [11] Rorano, A. M., & Pankey, M. S. (2013). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur. *unsrat*, 1-7